

A. Buku

- Agustina, Rosa, dkk. *Hukum Perikatan*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Djojodirjo, M.A Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Harahap, Yahya. *Ruang Lingkup Pelaksanaan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Istanto, F. Sugeng. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Ganda, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- . *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010.
- . *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*. Yogyakarta: CV. Mahakarya Pustaka, 2019.
- . *Teori Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju, 2021.
- Parlindungan A.P., *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)*, Bandung: CV Mandar Maju, 1994.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Cetakan Ke-5 Jakarta; Prenada Media Group, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 1989.

Sumardjono, Maria SW. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.

-----, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.

-----, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia: Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.

Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Edisi Ketiga. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*), *Staatsblad* 1847-23.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Het Herziene Indonesisch Reglement dan Reglement op de Rechtsvordering*), *Staatsblad* 1941-32, diperbarui dengan *Staatsblad* 1941-44 (HIR) dan *Staatsblad* 1927-227 (RBG).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Mam perihal Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah antara Bugisman bin M. Janwar Aco Mea., Adam Syah bin M. Janwar Aco Mea, dan Kasmawati binti M. Janwar Aco Mea sebagai Para Penggugat melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju sebagai Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten M sebagai Tergugat II tanggal 09 Maret 2017.

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 197/PDT/2017/PT MKS perihal Upaya Hukum Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Mam tanggal 18 Juli 2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3283 K/PDT/2017 perihal Upaya Hukum Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Mam tanggal 22 Desember 2017.

D. Jurnal

Abrianto, Bagus Oktafian, dkk, “Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014”, *Negara Hukum* 11, No. 1, (Juni 2020): 43-62, <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1574>

Arwanto, Bambang, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah”, *Yuridika* 31, No. 3, (September 2016): 358-383, <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4857>

Barokah, Muhamad Raziv dan Anna Erliyana, “Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, No. 4, (November 2020): 828-848, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3290>



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Tanah Antara Pemerintah Daerah Sebagai Pemegang Hak Pengelolaan Dengan Pemilik Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 3283 K/PDT/2017)

Salsabila, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum

Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari <http://eud.repository.ugm.ac.id/>

Bintoro, Kanadi Wasi, "Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata",

Dinamika Hukum 10, No. 2, (Juni 2010): 147-156,
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.2.147>

Edyanti, Yusrin dan Anna Erliyana, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan), *Dharmasiswa* 2, No. 2, (Juni 2022): 719-734,
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/14/>

Hidayat, Maskur, "Hukum Perdata Progresif: Perubahan dan Kesenambungan Penemuan Hukum di Bidang Hukum Perdata" *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, No. 3, (November 2014): 265-280,
<http://dx.doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.269-280>

Mantili, Rai, "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum", *Bina Mulia Hukum* 4, No. 1, (September 2019): 88-111,
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/67>

Murniati, Rilda, "Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, 1, (Maret 2016): 89-102, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.590>

Ni'mah, Siti Maghfirotn, "Peralihan Hak Milik Tanah Waris Dalam Hukum Islam", *Media Iuris* 2, No. 2, (Juni 2019): 217-231,
<https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13413>

Palit, Richard Cisanto, "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan", *Lex Privatum* 3, No. 2 (Juni 2015): 137-145,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/7842>

Poesoko, Herowati, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Hukum Acara Perdata*. 1, No. 2, (Desember 2015): 215-237

Slamet, Sri Redjeki, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", *Lex Journalica* 10, No. 2, (Agustus 2013): 107-120, <https://doi.org/10.47007/lj.v10i2.359>

Salam, Syukron, "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa", *Nurani Hukum* 1, No. 1, (Desember 2018): 33-44,
<http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818>

Santoso, Urip, "Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional", *Mimbar Hukum* 24, No. 2, (Juni 2012): 276-287,
<https://doi.org/10.22146/jmh.16130>

-----, "Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Oleh Pihak Ketiga", *Dinamika Hukum* 12, No. 2, (Mei 2013): 283-292,
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.210>

Sinaga, Dara Sari dan Akmaluddin Syahputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak", *Jurnal Hukum Unissula* 39, No. 1, (Maret 2023): 40-54, <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v39i1.30696>

Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi dkk, "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita pada *Petitum Ex Aquo Et Bono*", *Yuridika* 29, No. 1, (April 2014): 100-112, <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360>

Susilo, Agus Budi, "Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, 2, (Juli 2013): 291-308, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.291-308>

Swantoro, Herri, dkk, "Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum", *Mimbar Hukum* 29, No. 2, (Juni 2017): 190, <https://doi.org/10.22146/jmh.22103>

Wijayanta, Tata dkk, "Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal", *Mimbar Hukum* 22, No. 3, (Oktober 2010): 572-587, <https://doi.org/10.22146/jmh.16243>

-----, Tata, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Dinamika Hukum* 14, No. 2 (Mei 2014): 216-226, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>

E. Internet

<https://kbbi.web.id/sengketa> (diakses 09 Agustus 2024)

F. Tesis

Hardianti, Ika, "Tanggung Jawab Keperdataan Negara Atas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah", *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2018

Janwaruddin, "Penerapan Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah "Onrechtmatige Overheidsdaad" Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Yang Berdampak Pada Kerugian", *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2018

Paramita, Edwidya, "Eksekusi Fasilitas Umum yang Dibangun Di Atas Tanah Sengketa (Studi Kasus Sengketa Tanah Antara Warga Balikpapan Melawan Pemerintah Kota Balikpapan, Badan Pertanahan Nasional Dan Perusahaan Listrik Negara (Kasus Taman Bekapai))", *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2012.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

G. Kamus

Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Tanah Antara Pemerintah Daerah Sebagai Pemegang Hak Pengelolaan Dengan Pemilik Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 3283 K/PDT/2017)

Salsabila, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum

Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Kamus Hukum Umum, 2004.

H. Wawancara

Cahyono, Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Tanah Antara Pemerintah Daerah Pemegang Hak Pengelolaan Dengan Pemilik Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 3283 K/Pdt/2017), *Wawancara*, Sleman, 08 Oktober 2024.

Nur Kholis, Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Tanah Antara Pemerintah Daerah Pemegang Hak Pengelolaan Dengan Pemilik Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 3283 K/Pdt/2017), *Wawancara*, Surabaya, 13 Oktober 2024.